



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERKEBUNAN

Website : <http://disbun.kutaikartanegara.go.id>. Email : disbun@kutaikartanegarakab.go.id
Jl. Muso Bin Salim No. 12 - 13 Telp. (0541) 661073-661954 Fax. (0541) 661954
TENGGARONG Kode Pos 7551

Nomor : B-~~4564~~/DISBUN/SET-II/700/12/2022 Tenggarong, 27 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Tahun 2023,-----
Yth. **Bupati Kutai Kartanegara**
di
Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Penilaian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 17 yaitu “Identifikasi risiko dilaksanakan dengan; (a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; (b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan (c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko”. dan pada Pasal 18 yaitu (a) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan

untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. (b) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Untuk meminimalisasi ketidakpastian yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan wajib dilakukan pengelolaan risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko, pemantauan pengendalian dan reviu dan Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi dan konsultasi, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Hasil penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko tersebut sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara setelah dilaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Tujuan Penilaian Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Risiko:

Tujuan pelaksanaan Penilaian Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Menetapkan konteks/tujuan urusan wajib/urusan pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, menetapkan kriteria, skala dampak, skala kemungkinan dan tingkat risiko yang dapat diterima.
2. Mengidentifikasi risiko sesuai dengan proses bisnis kegiatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kegiatan.
3. Melakukan analisis risiko, dengan menganalisis dampak, kemungkinan dan menentukan skala risiko, melakukan evaluasi dan menentukan prioritas Risiko.

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, Menyusun rancangan informasi dan komunikasi dan rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengambilan keputusan.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):
5. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 34):

6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. SNI 8615 ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip-Prinsip dan Pedoman.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada risiko strategis dan risiko operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Sistematika

Sistematika dokumen manajemen risiko antara lain:

Bab I PENDAHULUAN

Memaparkan antara lain; (1) Latar belakang mengenai pentingnya pengelolaan Risiko Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari proses identifikasi, analisis dan penyusunan rencana tindak pengendalian risiko dan pemantauan pelaksanaan pengendalian yang dirumuskan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator strategis, program, dan kegiatan dan indikatornya pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara; (2) Dasar Hukum Pelaksanaan memaparkan dasar pelaksanaan penugasan Pendampingan Manajemen Risiko pada Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022. (3) Tujuan yaitu menguraikan tujuan pelaksanaan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022; (4) Ruang Lingkup memaparkan ruang lingkup pelaksanaan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022; dan (5) Sistematika memaparkan tata urutan susunan laporan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan

Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022.

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Memaparkan tentang Konteks Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Program dan Kegiatan (Perangkat Daerah) dan Kriteria,

BAB III PENILAIAN RISIKO TAHUN 2023

Memaparkan proses Penilaian Risiko meliputi; identifikasi dampak, identifikasi kemungkinan, analisis dampak dan kemungkinan, evaluasi tingkat resiko, penentuan peta risiko serta dan perangkingan prioritas risiko.

Bab IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2023

Memaparkan konsep perlakuan risiko yang telah dievaluasi yang merumuskan keputusan respon terhadap risiko dan rekomendasi pengemabilan kebijakan guna mengantisipasi dan menindaklanjuti ketika risiko terjadi.

BAB V MONITORING TAHUN 2023

Memaparkan kerangka monitoring dan reuiu pelaksanaan manajemen risiko.

BAB VII PENUTUP

Memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan penilaian dan penyusunan rencana tindak pengendalian Risiko, sebagai pedoman pengelolaan risiko Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2.1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemen Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”.

Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”

Tabel
Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Target Tahun 2023

No.	Indikator Tujuan	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan (Persen)	3,50

Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator : Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator : Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator : NTP Perkebunan (%)

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)

Tabel
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022
1	Produksi Sawit Rakyat (Ton)	277.032
2	Produksi Sawit PBS (Ton)	3.064.670
3	Produksi Karet (Ton)	9.616
4	Produksi Lada (Ton)	2.001
5	Produksi Kelapa (Ton)	2.706
6	Produksi Kopi (Ton)	14
7	Produksi Kakao (Ton)	39
8	Produksi Aren (Ton)	446
9	Produksi Kelor (Ton)	8
10	Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.510
11	Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	17.540
12	Produktivitas Karet (Kg/Ha)	978
13	Produktivitas Lada (Kg/Ha)	700

14	Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	472
15	Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	420
16	Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	718
17	Produktivitas Aren (Kg/Ha)	2.926
18	Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.262
19	NTP Perkebunan (%)	100

c. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Indikator OutPut

Dalam mewujudkan sasaran pada tahun anggaran 2023, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun program dan kegiatan dengan indikator hasil (output) sesuai Tabel berikut:

Tabel

Program , Kegiatan, Sub Kegiatan , Indicator, Target dan Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	27.128.820.598
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	469.000.000
	(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	252.000.000
	(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	66.000.000
	(3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	151.000.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	21.537.136.598	
	(4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2352 Orang/Bulan	21.309.016.598
	(5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	15 Laporan	228.120.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	131.660.000	
	(6)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	81.660.000
	(7)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
	(8)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	920.000.000	
	(9)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	379 Stel	700.000.000
	(10)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 Orang	150.000.000
	(11)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	70.000.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	1.196.520.000	
	(12)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.000.000
	(13)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	350.000.000

	(14)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	26.500.000
	(15)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55.020.000
	(16)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660 Laporan	605.000.000
	(17)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.948.250.000
	(18)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000
	(19)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000
	(20)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.518.250.000
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	104 Unit	901.254.000
	(21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	101 Unit	501.254.000
	(22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	400.000.000

II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28.645 Hektar (Ha)	11.296.000.000
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	237.435 Hektar (Ha)	
			3. Luas Areal Karet	17.928 Hektar (Ha)	
			4. Luas Areal Lada	3.412 Hektar (Ha)	
			5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.291 Hektar (Ha)	
			6. Luas Areal Kopi	89 Hektar (Ha)	
			7. Luas Areal Kakao	85 Hektar (Ha)	
			8. Luas Areal Aren	243 Hektar (Ha)	
			9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
(23)	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15 Paket	11.146.000.000	
		Luas pengadaan bibit & herbisida	32 Ha		
		Luas pengadaan pupuk	185 Ha		
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	50 Paket		
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	44 Orang		
		Luas pengembangan/ pemeliharaan Kebun Dinas	17 Ha		
		Jumlah pengadaan benih	20.000 Buah		
		Pengadaan Bibit sawit kelompok Tani Harapan Desa Buluq Sen	17 Ha		
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani "MULAWARMAN" (8700 Polon)	16 Ha		
		Pengadaan Bibit Sawit (20 Ha) Kelompok Tani "BERSATU" RT. 3	16 Ha		
		Bantuan Bibit Sawit (30 Ha) Kelompok Tani "SAMA MAJU" RT. 4	16 Ha		
		Penyediaan Bibit Sawit Kelompok Lembong Mandiri Jaya, Dusun Bensamar	16 Ha		
		Penyediaan Pupuk Kelompok Lembong Mandiri Jaya, Dusun Bensamar	20 Ha		
		Penyediaan Bibit Sawit Kelompok Tani Lamin Datu	16 Ha		
		Pengadaan Bibit Sawit Desa Loleng	15 Ha		
		Pengadaan Bibit Sawit Desa Kembang Janggut	12 Ha		

	10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Komoditi	125.000.000
	(24)	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.000 Meter	5.368.750.000
			2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	3 Unit	
	11	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	17 Unit	5.368.750.000
	(25)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	122.630.000
	(26)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	621.310.000
	(27)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	4.284.340.000
	(28)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	340.470.000
IV	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	72,00 Persen	450.000.000
	12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	220 Ha	450.000.000
	(29)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	110 Ha	150.000.000
	(30)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	22.650 Ha	150.000.000
	(31)	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	100 Ha	150.000.000

V	PERIZINAN USAHA PERTANIAN		1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	250.000.000	
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	12 Surat (PUP)		
	13	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	212 Pelaku	250.000.000	
	(32)	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	250.000.000	
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	9,76 Persen	550.000.000	
	14	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	49 Lembaga	550.000.000	
		(33)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Lembaga	400.000.000
		(34)	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Lembaga	150.000.000
JUMLAH					45.018.570.598,00	

d. Pengelola Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dibentuk Unit Pengelola Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko pada Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-4558/DISBUN/SET-III/700/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.

Susunan Unit Pengelola Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Muhamad Taufik NIP. 19670625 199203 1 007	Kepala Dinas Perkebunan	Ketua
2.	M. Taufik Rahmani, SP., MP NIP. 19701103 199803 1 010	Plt. Sekretaris	Koordinator
3.	Yuli Darmayani, SE NIP. 19780712 199803 2 003	Kasub. Bag. Umum dan Ketatalaksanaan	Anggota
4.	Edi Sumarno, SP NIP. 19651205 200801 1 010	Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan	Anggota
5.	Hj. Nor Aida, SP., MP NIP. 19710102 199402 2 001	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda Sub Koordinator Alat dan Mesin	Anggota
6.	Maryani Elviah, SP., MP NIP. 19720511 200912 2 003	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda Sub Koordinator Pengamatan dan Pengendalian OPT	Anggota
7.	Desy Noriyani, S.Hut., MP NIP. 19761221 200801 2 014	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Anggota
8.	John Lauren Barus, SE NIP. 19760901 201101 1 001	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
9.	Rusmansyah Putra NIP. 19840401 201001 1 023	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota

Tugas Unit Pengelola Risiko Tim pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

2.2 Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kriteria efektivitas pengendalian sesuai Tabel berikut:

Tabel

Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara	Ya	Ya	Efektif

konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi			
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

2.3 Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Bertujuan Memberikan Pemahaman Yang Sama Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Risiko Di Lingkup Pemerintah Daerah Mengenai Kriteria Penilaian Dan Analisis Atas Risiko-Risiko Yang Telah Diidentifikasi, Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Mengenai Tingkat Risiko Yang Dapat Diterima Maupun Tingkat Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Dan Memerlukan Respon Penanganan Lebih Lanjut. Kriteria Penilaian Risiko Terdiri 3 Komponen, Yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Dampak Risiko, Dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Kemungkinan

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

b. Skala Dampak

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode.

3. Skala Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

4. Pemetaan Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Peta Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

5. Pengelompokan Prioritas Penanganan Risiko

Tabel

Pengelompokan Prioritas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah sedang	4
9 – 12	Kuning	Sedang tinggi	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

7. Tingkat Risiko, Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Tindakan Eskalasi Penanganan Risiko

Tabel

Kriteria Tingkat Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tingkat Risiko	Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun responsif.	perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah	Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Rendah	Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1 Identifikasi Risiko

4.1.1 Risiko Strategis Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko menurut Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	U/C/C	Dampak (Konsekuenst)	Pemilik Risiko/ penanggung jawab/ pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
1	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomis Sub Sektor Perkebunan	2,20	45.018.570.598	1	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022	Produk si komoditi perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022	Eksternal & Internal	U/C/C	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022	Kepala Dinas Perkebunan
	Sasaran : Mengukahnya Produk si Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	267.635	31.614.531.710			Harga seluruh atau sebagian komoditi perkebunan lebih rendah dari perkebunan atau tahun 2022				
	Sasaran : Mengukahnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)	14.067	830.000.000							
	Sasaran : Mengukahnya Kesejahteraan Pekerja	NTP Perkebunan (%)	98	500.000.000							

	Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhsr Realisasi Kinerja SKPD																
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	151.000.000	3	Terlambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	Data yang ada kurang akurat	Internal	C	Tidak tersumanya dokumen evaluasi Kinerja OPD yang akurat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas							
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2352	21.309.016.598	4	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat Error pada Aplikasi/Jaringan pada saat proses input administrasi	Eksternal	C	Ketertinggalan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas							
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	228.120.000	5	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akurat/bel	Terdapat Error pada Aplikasi/Jaringan pada saat proses input administrasi	Eksternal	C	Terlambatnya Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas							
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	81.660.000	6	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	Belum terlaksananya koordinasi secara maksimal	Internal	C	Terlambatnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PPTK/Kasubag Umul/Sekretaris Dinas							
7	Pematussahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pematussahan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50.000.000	7	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	Adanya Mutasi Barang Milik Daerah Dalam Unit Kerja	Internal	C	Terlambatnya Penyusunan Laporan Pematussahan BMD	PPTK/Kasubag Umul/Sekretaris Dinas							
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	25.000.000	8	Data Pengelolaan Retribusi Daerah belum lengkap	Belum terlaksananya koordinasi secara maksimal	Internal	C	Terlambatnya Pembuatan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas							
9	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	379	700.000.000	9	Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan/diperjajikan	Pelaksanaan pekerjaan tidak komitmen dalam melaksanakan kontrak	Internal dan Eksternal	UC/C	Tidak tercapainya target jumlah pakelan dinas beserta atributnya	PPTK/Sub Koord. Kepegawaian/Sekretaris Dinas							
10	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mempelai	22	150.000.000	10	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	Kemampuan sebagian SDM Lembaga Pelaksana Kurang Kompeten Dalam Menyampaikan Materi	Internal dan Eksternal	UC/C	Kurang maksimal materi yang didapatkan	PPTK/Sub Koord. Kepegawaian/Sekretaris Dinas							

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan	15	70.000.000	11	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya perubahan regulasi	Internal dan Eksternal	UC/C	SDM terlatih dan komponen kurang tersedia	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	7	12	12	Tidak Sesuainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tidak tersedianya barang sesuai diperlukan	Internal dan Eksternal	UC/C	Barang yang diperlukan tidak tersedia	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	350.000.000	30	13	13	Tidak Sesuainya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tidak tersedianya barang sesuai diperlukan	Internal	C	Barang yang diperlukan tidak tersedia	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.500.000	13	14	14	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	Harga pasaran lebih tinggi dari STS	Internal dan Eksternal	UC/C	Kualitas barang kurang baik	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	55.020.000	4	15	15	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	Peleaksanaan kegiatan tidak melaksanakan monitoring secara maksimal	Internal	C	Biaya melebihi pagu	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.000.000	660	16	16	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa dikomodir	Adanya Rasionalisasi	Internal dan Eksternal	UC/C	Sebagian Perjalanan Dinas Tidak Terkomodir	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
17	Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	1	17	17	kurang maksimalnya pengolahan arsip	Masih kurangnya SDM di bidang kearsipan yang kompeten	Internal	C	Kurang tertatanya arsip dinas secara maksimal	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	340.000.000	12	18	18	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran listrik, air, telepon dengan pencatatan data yang tersedia	Ketatkan Tarif dasar air, listrik, telepon	Internal dan Eksternal	UC/C	Terjadi kurang bayar yang mengakibatkan STS	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas
19	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90.000.000	12	19	19	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihars/terawat dengan baik	Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak sesuai dengan aturan pakai	Internal	C	Banyaknya Sarana dan prasarana yang rusak baik rusak ringan maupun rusak berat (AC, Genset, Komputer, Laptop, Printer)	PPT/K/kaasubag Umul/Sekrutaris Dinas

		Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas	17				6. Sikap mental pekebun yang tidak bertanggung jawab				
		Jumlah pengadaan benih	20.000				7. Kurangnya dorongan dan pendampingan dari PPL/pelekas tenaga				
		Pengadaan Bibit sawit kelompok Tani Harapan Desa Buluh Sen	17				8. Pekebun kesulitan biaya untuk membuka/nyayapkan lahan				
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani "MULAY/ARMA N" (8700 Pohon)	16				9. Bibit yang disalurkan membawa bibit penyakit/hama tanaman				
		Pengadaan Bibit Sawit (20 Ha) Kelompok Tani "BERSATU" RT. 3	16				10. Bibit yang diterima tidak disimpan dan dirawat dengan baik oleh penerima				
		Bantuan Bibit Sawit (30 Ha) Kelompok Tani "SAMA MAJU" RT. 4	16				11. Pekebun terlalu lama menyiapkan bibit sebelum ditanam				
		Penyediaan Bibit Sawit Kelompok Lembang Mandiri Jaya, Dusun Bensamar	20				12. Bibit yang disalurkan dan ditanam tidak memenuhi standar mutu				
		Penyediaan Pupuk Kelompok Lembang Mandiri Jaya, Dusun Bensamar	16								
		Penyediaan Bibit Sawit Kelompok Tani Lantut Dahu	15								
		Pengadaan Bibit Sawit Desa Loking	12								
		Pengadaan Bibit Sawit Desa Kembar Jangut	24								
24	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	125.000.000	24	Perbinaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan tidak maksimal	Kurangnya tenaga pengawas benih perkebunan	Internal & Eksternal	C	Beredaranya benih tanaman perkebunan yang ilegal (palsu)	PPTK/Sub Koord. Perbinaan/Kabid Kabid PP

25	Perbaikan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2	122.630.000	25	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)	1. Kondisi cuaca (curah hujan tinggi) 2. Keterlambatan dalam penunjukan penyedia dan atau penandatanganan kontrak 3. Pelaksanaan pekerjaan tidak komitmen dalam melaksanakan kontrak 4. Terbatasnya kompetensi petugas terkait ilmu konstruksi/belum adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam ilmu/ bidang konstruksi untuk menilai hasil pekerjaan 5. Kurang maksimalnya peran pihak pengawas pekerjaan (fasilitas untuk pekerjaan swakelola jalan produksi) 6. Kenaikan harga bahan material 7. Rendahnya kemampuan SDM pengurus kelompok tani pelaksana swakelola pekerjaan pembangunan jalan produksi 8. Kesalahan dalam perencanaan (trial desain) 9. Kualitas konstruksi tidak sesuai standar disebarkan kesanggupan penyedia	Eksternal & Internal	UC/C	1. Tidak tercapainya target peringkasan produk/ tanaman perkebunan 2. Konstruksi mudah/cepat rusak 3. Bangunan runtuh/tidak berfungsi sepenuhnya atau pada bagian tertentu	PPTK/Sub Koord Sarana & Pansarana/Kabid Produksi
26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	621.310.000	26	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)	1. Kondisi cuaca (curah hujan tinggi) 2. Keterlambatan dalam penunjukan penyedia dan atau penandatanganan kontrak 3. Pelaksanaan pekerjaan tidak komitmen dalam melaksanakan kontrak 4. Terbatasnya kompetensi petugas terkait ilmu konstruksi/belum adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam ilmu/ bidang	Eksternal & Internal	UC/C	1. Tidak tercapainya target peringkasan produk/ tanaman perkebunan 2. Konstruksi mudah/cepat rusak 3. Bangunan runtuh/tidak berfungsi sepenuhnya atau pada bagian tertentu	PPTK/Sub Koord Sarana & Pansarana/Kabid Produksi

28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pereliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9	340.470.000	28	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperkirakan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsidesain)	1. Kondisi cuaca (curah hujan tinggi) 2. Keterlambatan dalam penandatanganan kontrak 3. Pelaksanaan pekerjaan tidak konsisten dalam melaksanakan kontrak 4. Terbatasnya kompetensi pelugas terkait ilmu konstruksi/belum adanya pelugas yang memiliki kompetensi dalam ilmu/bidang konstruksi untuk menilai hasil pekerjaan 5. Kurang maksimalnya peran pihak pengawas pekerjaan (fasilitas untuk pekerjaan swakelola jalan produksi) 6. Kenaikan harga bahan material 7. Rendahnya kemampuan SDM pengurus kelompok harti pelaksana swakelola pekerjaan pembangunan jalan produksi 8. Kesalahan dalam perencanaan (mal desain) 9. Kualitas konstruksi tidak sesuai standar disebalik kesanggupan penyedia	Eksternal & Internal	UC/C	1. Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan 2. Konstruksi mudah/cepat rusak 3. Bangunan runtuh/tidak berfungsi sepenuhnya atau pada bagian tertentu	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
29	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	110	150.000.000	29	1. Tidak terlaksananya pengamanan dan gerakan pengendalian OPT 2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan	1. Kurangnya pelugas teknis Pengamat dan Pengendali OPT 2. Tidak tersedianya sarana untuk pengendalian OPT secara memadai 3. Kurangnya motivasi pekabuh pekabuh dalam melakukan pengendalian OPT	Internal & Eksternal	UC/C	1. Tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan 2. Kesalahan dalam menentukan dan melakukan gerakan pengendalian OPT	PPTK/Sub Koord. Pengamatan & Pengendalian OPT/K.ahid Perindungan

						berdasarkan rekomendasi teknis hasil pengamatan oleh petugas			
						4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengamat			
30	Peremangan Danjapak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Tindakan Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dihangani	22.650	150.000.000	30	Tidak optimalnya pengelolaan ANKKT di dalam areal IUP oleh perusahaan perkebunan	Internal & Eksternal	U/C/C	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan/Kabid Pertindungan
						1. Belum tersosialisasinya secara komprehensif Peraturan Gubernur Kalimantan No. 43/2021 Tentang Pengelolaan ANKKT di Area Perkebunan dan Keputusan Bupati Kutai No. 475/SK-BUP/HK/2021/Tentang Penetapan ANKKT di Dalam Kawasan Pertunjukan Perkebunan			
						2. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki RPP (Rencana Pengelolaan dan Pemetaan) ANKKT			
						3. Masih kurangnya komitmen Pimpinan Perusahaan Perkebunan dalam pengelolaan ANKKT			
31	Perencegahan, Pemangan, Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Perencegahan, Pemangan, Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	150.000.000	31	1. Masih rendahnya kesadaran lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	Eksternal	U/C	PPTK/Sub Koord. Pengendalian Lingkungan/Kabid Pertindungan
						2. Belum terlaksananya Fasilitas Gangguan Usaha Perkebunan yang disebutkan baik oleh bercaja alam dan manusia			
32	Pertinaan dan Pengawasan Penerimaan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diberna dan Diawasi	2	250.000.000	32	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidyaanya	Internal & Eksternal	U/C/C	PPTK/Sub Koord. Pembinaan dan Gangguan Usaha/Kabid Usaha dan Penyuluhan
						1. Masih kurangnya sosialisasi kepada pekebun tentang Peraturan Bupati No. tentang Pendaftaran Usaha Budidya Perkebunan			
						2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik			
						3. Daya dalam STDB tidak valid			
						4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak			
						3. Penguasaan pekebun dalam penggunaan aplikasi rendah			
						4. Isian data dan persyaratan administrasi permohonan			
						2. Penerbitan STDB secara online tidak terlaksana			
						3. Minimnya komplek dari pihak-pihak terkait			
						4. Pola kebun sebagai lampiran STDB tidak			

4.2 Analisis Risiko

Hasil Analisis Risiko Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai berikut:

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Keper tahanan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
1	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan oleh Produksi komoditi perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dan Harga seluruh atau sebagian komoditi perkebunan lebih rendah dari perkiraan atau tahun 2022	2	3	6	Rendah sedang	1. Perda no. 16 tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Kutai Katanegara 2. RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Kutai Katanegara 3. Renstra Dinas Perkebunan 2021-2026 4. Renja 2023 5. DPA TA. 2023	Memadai	Efektif	Ada

Hasil Analisis Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai berikut:

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Keper tahanan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	2	2	4	Rendah	Renstra, Renja dan DPA Dinas Perkebunan, SOP Renstra, SOP Renja, SOP Penyusunan RKAD/DPA SKPD, SOP Pengelolaan Data, SOP Tampilan, SOP IKK dan LPPD, SOP LKIP.	Memadai	Efektif	Tidak
2	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah	SOP Pengelolaan Kebun Dinas, SOP Kegiatan Pemanfaatan, Penyajian dan Pemanfaatan lahan Perkebunan, SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada

3	Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahkannya 4. Terdapat bibit tanaman mati sebelum ditanam oleh pekebun 5. Tanaman dari bibit tanaman tidak tumbuh dengan baik	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada																											
										4	2	2	4	Rendah	SOP Identifikasi dan Pengamatan OPT, SOP Pengendalian OPT, SOP Pemantauan	Memadai	Tidak Efektif	Ada																		
																			5	2	2	4	Rendah	Peraturan Menteri Pertanian nomor : 07 / Permentan / OT.140 /22009 tentang Pedoman Pelatihan Usaha Perkebunan dan SK Dirjen nomor : 105 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian STDB	Memadai	Tidak efektif	Ada									
																												6	2	2	4	Rendah	SOP Penyuluhan	Memadai	Tidak efektif	Ada
2	2	2	4	Rendah	Memadai	Tidak efektif	Ada																													
6	Tidak Bertambahnya Kenaikan Persentase Kelas Kelompok Tani (Persen)	2	2	4	Rendah	Memadai	Tidak efektif	Ada																												

Hasil Analisis Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai berikut:

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pergendalian yg sudah ada (Keapa tahun /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ peringkat risiko		Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
1	Tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan, Peringkat Daerah	2	2	4	Rendah	SOP Rencana, SOP Renge, SOP Penyusunan RKA/DP A SKPD	Memadai	Efektif	Ada
2	Tidak Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1	2	2	Rendah	SOP Pengelolaan Data	Memadai	Efektif	Tidak

3	Terlambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	2	2	4	Rendah	SOP Tarifin, SOP IKK dan I, PPD, SOP UKIP	Memadai	Tidak Efektif	Ada
4	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2	2	4	Rendah	SOP Gaji Pegawai, SOP Keaikaan Gaji Berkala, SOP Rapel Gaji dan SOP Tpp	Memadai	Efektif	Tidak
5	Data Pembuatan Laporan Bulanan Kemampuan Tidak Akuntabel	2	2	4	Rendah	SOP Penyampaian SPJ, SOP Pajak	Memadai	Efektif	Tidak
6	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	2	2	4	Rendah	SOP Pengelolaan Data	Memadai	Efektif	Ada
7	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	2	2	4	Rendah	SOP Pengamanan Barang Inventaris	Memadai	Efektif	Ada
8	Data Pengelolaan Retribusi Daerah belum lengkap	2	2	4	Rendah	SOP pengelolaan data	Memadai	Efektif	Tidak
9	Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperkirakan	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
10	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	2	2	4	Rendah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54/SK-BUP/HK/2021 tentang Standar Rumpun dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksanaan	Memadai	Efektif	Ada
11	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	4	Rendah	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54/SK-BUP/HK/2021 tentang Standar Rumpun dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksanaan	Memadai	Efektif	Ada
12	Tidak Seluruhnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
13	Tidak Seluruhnya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
14	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
15	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Tidak
16	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa dilaksanakan	2	2	4	Rendah	SOP Penyelenggaraan Rapat, SOP SPJ dan SPJD	Memadai	Efektif	Ada
17	kurang maksimalnya pengelolaan arsip	2	2	4	Rendah	SOP Pengarsipan	Memadai	Efektif	Tidak
18	Kurang sinkronnya terfagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan persiaran dana yang tersedia	2	2	4	Rendah	SOP SPJ dan SOP GU	Memadai	Efektif	Tidak
19	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	2	2	4	Rendah	SOP Perbaikan Sarana Prasarana	Memadai	Efektif	Tidak
20	1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kesehatan 2. Tidak terlaksananya beberapa	2	2	4	Rendah	SOP Pengelolaan Website, SOP Pelaksanaan Expo	Memadai	Efektif	Tidak

	kegiatan even pameran abu promosi hiar dan dalam daerah								
	3. Pengelolaan website OPD kurang maksimal								
21	Tidak semua kemarahan dinas bisa terkomodir pemuliharaannya	2	2	4	Rendah	SOP Perbaikan Sarana Prasarana	Memadai	Efektif	Ada
22	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	2	2	4	Rendah	SOP Perbaikan Sarana Prasarana	Memadai	Efektif	Ada
23	1. Keberhasilan penyuluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 2. Tidak terakannya penyuluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 3. Terdapat pekecan yang tidak memantapkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual / meninkahlangkannya 4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun 5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik	2	2	4	Rendah	SOP Pengelolaan Kebun Dinas, SOP Kegiatan Pemantauan, Penyajian dan Penambatan lahan Perkebunan, SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
24	Pembinaan dan pengawasan terhadap pedaran banhi tanaman perkebunan tidak maksimal	2	2	4	Rendah	SOP Kegiatan Pemantauan, Penyajian dan Penambatan lahan Perkebunan	Memadai	Efektif	Ada
25	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/dipertajikan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/hungsi desain)	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
26	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/dipertajikan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/hungsi desain)	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
27	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/dipertajikan 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/hungsi desain)	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada
28	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang	2	2	4	Rendah	SOP Pengadaan Barang	Memadai	Efektif	Ada

	direncanakan/di-perjanjikan								
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis								
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/hangsi desain)								
29	1. Tidak terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT 2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan	2	3	6	Rendah sedang	SOP Identifikasi dan Pengamatan OPT, SOP Pengendalian OPT, SOP Perawatan	Memadai	Efektif	Ada
30	Tidak optimalnya pengelolaan ANKKT di dalam areal IUP oleh perusahaan	2	2	4	Rendah	SOP Pengendalian Lingkungan	Memadai	Efektif	Ada
31	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan Kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	2	2	4	Rendah	SCP Serana Perlindungan	Memadai	Efektif	Ada
32	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya 2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik 3. Data dalam STDB tidak valid 4. Hasil pertanian tidak akurat dan atau tidak lengkap 5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (IUP)	2	3	6	Rendah sedang	Peraturan Menteri Pertanian nomor : 07 / Pertanian / OT.140 /2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan SK Dirjen nomor : 105 tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB	Memadai	Efektif	Ada
33	1. Peralaksanaan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal 2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah 3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang 4. Keikutsertaan pekebun minimal dalam kegiatan pembinaan rendah	2	2	4	Rendah	SOP Penyuluhan	Memadai	Efektif	Ada
34	Facilities dan pengembangan pembenhutan dan pembenahan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	2	2	4	Rendah	SOP Penyuluhan	Memadai	Efektif	Ada

4.4 Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan. Evaluasi risiko meliputi proses perbandingan hasil analisis dari masing-masing risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi tersebut mengarah pada keputusan untuk:

- Tidak melakukan apa-apa
- Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko
- Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik.
- Mempertahankan pengendalian risiko yang ada
- Mempertimbangkan ulang sasaran proses.

Hasil analisis terhadap risiko yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah selanjutnya dilakukan evaluasi dan ditentukan Prioritas Penanganan Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara seperti Tabel berikut:

4.4.1 Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
1	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan oleh Produksi komoditi perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dan Harga seluruh atau sebagian komoditi perkebunan lebih rendah dari perkiraan atau tahun 2022	6	Rendah Sedang	1	Mitigasi

4.4.2 Evaluasi Risiko Program

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko
2	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	4	Rendah	1	Mitigasi
	2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan				
	3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangannya				
	4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun				
	5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik				
3	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	2	Mitigasi
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis				
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/ desain)				
4	1. Tidak tercapainya luas pengendalian OPT sesuai target	4	Rendah	3	Mitigasi
	2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan				
5	Kurangnya Pekebun yang mendapatkan STDB	4	Rendah	4	Mitigasi
	Perusahaan yang mendapat Sertifikat tidak sesuai target				
6	Tidak Bertambahnya Kenaikan Persentase Kelas Kelompok Tani (Persen)	4	Rendah	5	Mitigasi
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	4	Rendah	6	Diterima

4.4.3 Evaluasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko
23	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	4	Rendah	1	Mitigasi
	2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan				
	3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual / menundahkannya				
	4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun				
	5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik				
24	Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan tidak maksimal	4	Rendah	2	Mitigasi
27	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	3	Mitigasi
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis				
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)				
26	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	4	Mitigasi
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis				
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)				
28	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	5	Mitigasi
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai				

	dengan spesifikasi teknis				
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)				
25	1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	6	Mitigasi
	2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis				
	3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)				
29	1. Tidak terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT	6	Rendah sedang	7	Mitigasi
	2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan				
30	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal IUP oleh perusahaan perkebunan	4	Rendah	8	Mitigasi
31	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	4	Rendah	9	Mitigasi
32	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya	6	Rendah sedang	10	Mitigasi
	2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik				
	3. Data dalam STDB tidak valid				
	4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap				
	5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)				
33	1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal	4	Rendah	11	Mitigasi
	2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah				
	3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang				
	4. Keikutsertaan pekebun milenial dalam kegiatan				

	pembinaan rendah				
34	Fasilitasi dan pendampingan pembentukan dan pembinaan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	4	Rendah	12	Mitigasi
4	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4	Rendah	13	Diterima
13	Tidak Sesuai jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Rendah	14	Mitigasi
18	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Rendah	15	Mitigasi
9	Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Rendah	16	Mitigasi
21	Tidak semua kendaraan dinas bisa terakomodir pemeliharaannya	4	Rendah	17	Mitigasi
22	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	4	Rendah	18	Mitigasi
1	Tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	4	Rendah	19	Mitigasi
2	Tidak Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Rendah	20	Diterima
3	Terlambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	4	Rendah	21	Mitigasi
5	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akuntabel	4	Rendah	22	Diterima
6	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	4	Rendah	23	Mitigasi
7	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	4	Rendah	24	Mitigasi
10	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	4	Rendah	25	Mitigasi
11	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi	4	Rendah	26	Mitigasi

	Peraturan Perundang-Undangan				
16	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa diakomodir	4	Rendah	27	Mitigasi
17	kurang maksimalnya pengelolaan arsip	4	Rendah	28	Mitigasi
19	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	4	Rendah	29	Diterima
20	1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kematian	4	Rendah	30	Mitigasi
	2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam daerah	4	Rendah		
	3. Pengelolaan website OPD kurang maksimal	4	Rendah		
15	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	4	Rendah	31	Diterima
14	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	4	Rendah	32	Mitigasi
8	Data Pengelolaan Retribusi Daerah belum lengkap	4	Rendah	33	Diterima
12	Tidak Sesuainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Rendah	34	Mitigasi

4.5 Peta Risiko

Berdasarkan Hasil Evaluasi Risiko, disusun Peta Risiko Perangkat Daerah

4.51 Peta Penurunan Level Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

4.5.2 Peta Penurunan Level Risiko Program

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

4.5.3 Peta Penurunan Level Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

5.1 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap perlakuan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Hasil seperti Tabel berikut:

5.1.1 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
1	Pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan oleh Produksi komoditi perkebunan lebih rendah dari target atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dan Harga seluruh atau sebagian komoditi perkebunan lebih rendah dari perkiraan atau tahun 2022	1	Mitigasi	1. Melakukan evaluasi seecara cermat terhadap komponen-komponen belanja yang tidak mendesak dan satuan biaya dalam RKA/DPA yang tidak sesuai dengan kondisi terkini 2. Mengusulkan pergeseran dan atau perubahan belanja berdasarkan hasil evaluasi 3. Melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment kepada pekebun penerima bantuan, PPL dan UPTD	TW I - TW IV	Sekretaris Dinas Perkebunan

5.2 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak memenuhi Target	4	Mitigasi	Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait	TW I s/d TW IV	Sekretariat
2	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan 2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan	4	Mitigasi	1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan survey harga dan	TW I s/d TW IV	PA, Bidang Produksi; Bidang Pengembangan & Perbenihan

	<p>sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan</p> <p>3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual/memindahtangkannya</p> <p>4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun</p> <p>5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik</p>			<p>spesifikasi barang secara cermat dan terbaru</p> <p>3. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun lainnya</p>		
3	<p>1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan</p> <p>2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/ desain)</p>	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca</p> <p>2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima</p> <p>3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi
4	<p>1. Tidak tercapainya luas pengendalian OPT sesuai target</p> <p>2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan</p>	4	Mitigasi	<p>1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani</p> <p>2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Perlindungan
5	<p>Kurangnya Pekebun yang mendapatkan STDB</p> <p>Perusahaan yang mendapat Sertifikat tidak sesuai target</p>	4	Mitigasi	<p>Pengambilan titik koordinat dan pengajuan STDB</p> <p>Analisa data dan Administrasi, Peninjauan Lapangan, dan penerbitan surat terkait PUP</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Usaha dan Penyuluhan
6	Tidak Bertambahnya Kenaikan Persentase Kelas Kelompok Tani (Persen)	4	Mitigasi	Sosialisasi, Pendampingan dan Pembinaan	TW I s/d TW IV	Bidang Usaha dan Penyuluhan

5.3. Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
1	Tidak tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	4	Mitigasi	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Penyesuaian terhadap Program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam Program prioritas	TW I s/d TW IV	Sekretariat
2	Tidak Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Diterima	Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Membua Kertas Kerja Laporan Keuangan dan Kertas Kerja Manajemen Resiko	TW I s/d TW IV	Sekretariat
3	Terlambatnya Pembuatan Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah	4	Mitigasi	Koordinasi dengan pemangku jabatan (Bidang/Sekretariat) dan Melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi Data Keseluruh UPT P3R yang ada di Kecamatan	TW I s/d TW IV	Sekretariat
4	Teriundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4	Diterima	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan dan Melakukan Rekon Data Kepegawaian	TW I s/d TW IV	Sekretariat
5	Data Pembuatan Laporan Bulanan Keuangan Tidak Akuntabel	4	Diterima	Membuat Laporan Keuangan secara Berkala	TW I s/d TW IV	Sekretariat
6	Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belum Lengkap	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja dan Melaksanakan Rekonsialisasi Antara BMD dan Keuangan	TW I s/d TW IV	Sekretariat
7	Data Barang Milik Daerah Belum Terupdate	4	Mitigasi	Koordinasi antara unit Kerja dan Perlu adanya pendataan ulang terkait data BMD Ke Bidang, Sekretariat dan UPT di 18 Kecamatan	TW I s/d TW IV	Sekretariat
8	Data Pengelolaan Retribusi Daerah belum lengkap	4	Diterima	Membuat Laporan Penerimaan secara Berkala	TW I s/d TW IV	Sekretariat
9	Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan	4	Mitigasi	Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia	TW I s/d TW IV	Sekretariat
10	Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak Berjalan Sesuai Yang Diharapkan	4	Mitigasi	Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Regulasi	TW I s/d TW IV	Sekretariat
11	Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Mitigasi	Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Regulasi	TW I s/d TW IV	Sekretariat
12	Tidak Sesuaianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Mitigasi	Melakukan Survey Barang	TW I s/d TW IV	Sekretariat
13	Tidak Sesuaianya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Mitigasi	Melakukan Survey Barang	TW I s/d TW IV	Sekretariat

14	Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan	4	Mitigasi	Pembelian barang menyesuaikan dengan harga pasar pada saat ini	TW I s/d TW IV	Sekretariat
15	Dokumen/Berkas yang di copy/cetak melebihi volume	4	Diterima	Melakukan monitoring secara bertahap dan berkoordinasi kepada penyedia	TW I s/d TW IV	Sekretariat
16	Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi bisa diakomodir	4	Mitigasi	Memilah kegiatan yang penting untuk dihadiri, Meminimalisir Perjalanan Dinas Sesuai Kepentingan, Berkoordinasi dan berkonsultasi dalam percepatan ketersediaan anggaran, Selektif dalam memfasilitasi makan minum rapat dan mengajukan usulan penambahan anggaran di perubahan	TW I s/d TW IV	Sekretariat
17	kurang maksimalnya pengelolaan arsip	4	Mitigasi	Melaksanakan Bintek Kearsipan dan berkoordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait	TW I s/d TW IV	Sekretariat
18	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Mitigasi	Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN, PDAM, Telkom) dan Verifikasi jumlah tagihan Listrik, air dan telpon	TW I s/d TW IV	Sekretariat
19	Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak terpelihara/terawat dengan baik	4	Diterima	Menggunakan peralatan sesuai dengan aturan pakai dan Melakukan pengecek peralatan dan perlengkapan kantor secara continue	TW I s/d TW IV	Sekretariat
20	1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga Non PNS dan Biaya BPJS Kesehatan dan Kematian 2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan even pameran atau promosi luar dan dalam daerah 3. Pengelolaan website OPD kurang maksimal	4	Mitigasi	1. Memaksimalkan Tenaga Yang ada Baik ASN Maupun Non ASN dan Mengupdate Regulasi 2. Melakukan koordinasi pada pihak terkait pelaksana pameran yang akan diikuti dan Perlu adanya koordinasi dan konsultasi pada pihak terkait 3. Koodinasi dengan pihak terkait, melakukan pelatihan pengelolaan website	TW I s/d TW IV	Sekretariat
21	Tidak semua kendaraan dinas bisa terakomodir pemeliharaannya	4	Mitigasi	Melakukan perawatan kendaraan dinas yang digunakan dan Perlu adanya Perbaikan terhadap kendaraan yang rusak baik berat maupun ringan	TW I s/d TW IV	Sekretariat
22	Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi dan standar mutu konstruksi	4	Mitigasi	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan Usulan pendampingan petugas dari dinas teknis	TW I s/d TW IV	Sekretariat
23	1. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan	4	Mitigasi	1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi; Bidang Pengembangan

	<p>2. Tidak terlaksananya penyaluran bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan</p> <p>3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan bantuan sarana produksi dengan baik dan atau menjual / memindahtangkannya</p> <p>4. Terdapat bibit bantuan mati sebelum ditanam oleh pekebun</p> <p>5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh dengan baik</p>			<p>2. Melakukan survey harga dan spesifikasi barang secara cermat dan terbaru</p> <p>3. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun lainnya</p> <p>4. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL</p> <p>5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia</p> <p>7. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan kepada penyedia untuk mematuhi isi perjanjian</p> <p>8. Meningkatkan kecermatan dan keakuratan dalam penyiapan dokumen pengadaan dan HPS</p> <p>9. Verifikasi dan pemantapan CPCL dilakukan secara ketat</p> <p>10. Sosialisasi kepada calon penerima sebelum penyaluran bantuan dan Pemberian dorongan dan pengawalan kepada pekebun untuk melakukan penyimpanan dan perawatan bibit yang diterima dengan baik serta agar cepat ditanam serta Bimbingan teknis budidaya kepada pekebun</p> <p>11. Pemberian motivasi dan pendampingan pemanfaatan bantuan secara optimal dan Pemberian dorongan, bimbingan dan pengawalan yang intensif oleh PPL/ petugas lapang</p> <p>12. Pemeriksaan mutu bibit sebelum disalurkan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli</p>		& Perbenihan
24	Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan tidak maksimal	4	Mitigasi	Sosialisasi penggunaan benih unggul bersertifikat dan Berkoordinasi dengan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kaltim	TW I s/d TW IV	Bidang Pengembangan

25	<p>1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan</p> <p>2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)</p>	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca</p> <p>2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima</p> <p>3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia</p> <p>4. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL</p> <p>5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia</p> <p>7. Memberikan dorongan, penantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak</p> <p>8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi
26	<p>1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan</p> <p>2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)</p>	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca</p> <p>2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima</p> <p>3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia</p> <p>4. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL</p> <p>5. Melakukan rapat koordinasi dengan</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi

				<p>Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia</p> <p>7. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak</p> <p>8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual</p>		
27	<p>1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan</p> <p>2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)</p>	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca</p> <p>2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima</p> <p>3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia</p> <p>4. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL</p> <p>5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia</p> <p>7. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak</p> <p>8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/review secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi

				dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual		
28	<p>1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan/diperjanjikan</p> <p>2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>3. Kegagalan konstruksi (gagal konstruksi/fungsi/desain)</p>	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca</p> <p>2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima</p> <p>3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia</p> <p>4. Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL</p> <p>5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia</p> <p>7. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak</p> <p>8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/revisi secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Produksi
29	<p>1. Tidak terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT</p> <p>2. Kesalahan Pengamat OPT dalam identifikasi jenis OPT dan luas serangan</p>	6	Mitigasi	<p>1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani</p> <p>2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Perlindungan
30	Tidak optimalnya pengelolaan ANKT di dalam areal IUP oleh perusahaan perkebunan	4	Mitigasi	Mewajibkan Pimpinan perusahaan besar perkebunan (PBS) untuk menetapkan ANKT di dalam areal IUP masing-	TW I s/d TW IV	Bidang Perlindungan

				masing PBS dengan Keputusan Direktur		
31	Meningkatnya Kebakaran Lahan dan kebun Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	4	Mitigasi	<p>1. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun dengan semua stakeholder terkait, Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pemasangan spanduk himbauan kebakaran lahan, dan membentuk serta memaksimalkan Kelompok tani Peduli api yang ada di kecamatan</p> <p>2. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dengan semua stakeholder terkait serta Melakukan kegiatan fasilitasi Gangguan Usaha Perkebunan</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Perlindungan
32	<p>1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya</p> <p>2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan baik</p> <p>3. Data dalam STDB tidak valid</p> <p>4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atau tidak lengkap</p> <p>5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)</p>	6	Mitigasi	<p>1. Sosialisasi kepada aparat pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah kecamatan serta PPL terkait STDB</p> <p>2. Melakukan perawatan dan pemutakhiran aplikasi dan Pembekalan kepada tenaga penginput data usulan dari petugas UPID dan desa/kelurahan</p> <p>3. Evaluasi Petunjuk Teknis Verifikasi usulan STDB, Menunjuk tenaga admin dan memberikan pembekalan</p> <p>4. Memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pemetaan/GIS dan Bekerjasama dengan petugas pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan pemetaan</p> <p>5. Mengikutsertakan tenaga PUP yang ada pada Penyegaran Petugas PUP dan mengusulkan perpanjangan Sertifikat PUP</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Usaha dan Penyuluhan
33	<p>1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pekebun tidak maksimal</p> <p>2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun rendah</p>	4	Mitigasi	<p>1. Meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan BPP, Pendes/Kelurahan, KTNA, UPT P3R, PPL) dan Melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala dengan Koordinator BPP dan PPL</p> <p>2. Mengikutsertakan PPL dalam kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dan Melakukan komunikasi yang intens dengan pekebun melalui</p>	TW I s/d TW IV	Bidang Usaha dan Penyuluhan

	3. Daya serap pekebun dalam menerima materi kurang			grup WA		
	4. Keikutsertaan pekebun milenial dalam kegiatan pembinaan rendah			3. Mendorong PPL untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan kualitas metoda pendampingan dan Menerapkan sistem reward and punishment kepada PPL		
34	Facilitasi dan pendampingan pembentukan dan pembinaan Badan usaha Milik Petani tidak maksimal	4	Mitigasi	Pembekalan/Bimtek fasilitator/PPL tentang Badan Usaha Milik Petani, Sosialisasi kepada pekebun dan pengurus lembaga pekebun dan Membangun koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan	TW I s/d TW IV	Bidang Usaha dan Penyuluhan

BAB VI MONITORING

6.1 Pemantauan Risiko

Pendampingan penyusunan Jadwal Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel berikut:

6.1.1 Pemantauan RTP Risiko Strategis

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Melakukan evaluasi seecara cermat terhadap komponen-komponen belanja yang tidak mendesak dan satuan biaya dalam RKA/DPA yang tidak sesuai dengan kondisi terkini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Dinas Perkebunan	Kepala Dinas Perkebunan
2. Mengusulkan pergeseran dan atau perubahan belanja berdasarkan hasil evaluasi														
3. Melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment kepada pekebun penerima bantuan, PPL dan UPTD)														

6.1.2 Pemantauan RTP Risiko Program

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	Sekretaris
1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PA, Bidang Produksi; Bidang Pengembangan & Perbenihan	PPTK/Sub Koord. Sarana & Prasarana, Sub Koord. Pengembangan Areal/Kabid Produksi & Kabid PP
2. Melakukan survey harga dan spesifikasi barang secara cermat dan terbaru														
3. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun lainnya														
1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima														
3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia														
1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan	PA/PPTK
2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT														
1. Pengambilan titik koordinat dan pengajuan STDB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PA/PPTK
2. Analisa data dan Administrasi, Peninjuan Lapangan, dan penerbitan surat terkait PUP														
Sosialisasi, Pendampingan dan Pembinaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Usaha dan Penyuluhan	PA/PPTK

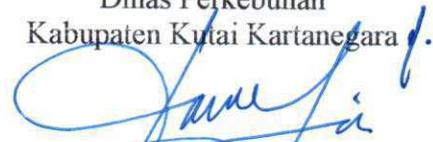
6.1.3 Pemantauan RTP Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penangung jawab Risiko	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Penyesuaian terhadap Program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam Program prioritas	√	√	√					√	√	√				Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Membua Kertas Kerja Laporan Keuangan dan Kertas Kerja Manajemen Resiko	√	√	√							√	√	√		Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Koordinasi dengan pemangku jabatan (Bidang/Sekretariat) dan Melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi Data Keseluruh UPT P3R yang ada di Kecamatan			√			√				√			√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan dan Melakukan Rekon Data Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Membuat Laporan Keuangan secara Berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Koordinasi antara unit Kerja dan Melaksanakan Rekonsialisasi Antara BMD dan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Koordinasi antara unit Kerja dan Perlu adanya pendataan ulang terkait data BMD Ke Bidang, Seketariat dan UPT di 18 Kecamatan			√			√				√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Membuat Laporan Penerimaan secara Berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Sub Koord PPK/Sekretaris Dinas
Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia				√	√	√								Sekretariat	PPTK/Sub Koord. Kepegawaian/Sekretaris Dinas
Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Regulasi								√	√	√	√			Sekretariat	PPTK/Sub Koord. Kepegawaian/Sekretaris Dinas
Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Regulasi					√	√	√	√	√	√				Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang	√	√	√	√	√	√								Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang		√	√											Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Pembelian barang menyesuaikan dengan harga pasar pada saat ini					√									Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan monitoring secara bertahap dan berkoordinasi kepada penyedia			√			√				√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Memilah kegiatan yang penting untuk dihadiri, Meminimalisir Perjalanan Dinas Sesuai Kepentingan, Berkoordinasi dan berkonsultasi dalam percepatan ketersediaan anggaran, Selektif dalam memfasilitasi makan minum rapat dan mengajukan usulan penambahan anggaran di perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Melaksanakan Bimtek Kearsipan dan berkoordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait			√			√				√			√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas
Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN, PDAM, Telkom) dan Verifikasi jumlah tagihan Listrik, air dan telpon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat	PPTK/Kasubbag Umtal/Sekretaris Dinas

<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/revisi secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual 		Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/revisi secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual 		Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum serah terima Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran oleh penyedia Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental kepada pelaksana pekerjaan agar memenuhi isi kontrak Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS) dan Melakukan telaahan/revisi secara cermat bersama konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang disesuaikan dengan kondisi teraktual 		Bidang Produksi	PPTK/Sub Koord Sarana & Parasarana/Kabid Produksi
<ol style="list-style-type: none"> Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok tani Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas Pengamat dan Pengendali OPT 		Bidang Perlindungan	PPTK/Sub Koord. Pengamatan & Pengendalian OPT/Kabid Perlindungan

Demikian Laporan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun untuk dijadikan pedoman pengelolaan risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Tahun 2023, dan sebagai bahan masukan pertimbangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam Pengambilan Keputusan terkait dengan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. Muhamad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007

Tembusan Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**